

**KESENJANGAN PENDAPATAN DI SATUAN WILAYAH  
PEMBANGUNAN I JAWA TIMUR (1996-1998)**

**SKRIPSI**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh

*Lenny*

NIM. 960810101229/SP

Asal	Hadiah	Klasifikasi 338.9 LEN R
Terima Tgl:	Pembelian 14 OCT 2000	
No. Induk :	10 230 10 / 2000	

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

2000



## JUDUL SKRIPSI

KESENJANGAN PENDAPATAN DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN I

JAWA TIMUR (1996 - 1998)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : L e n n y

N. I. M. : 960810101229

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

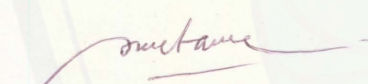
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

12 Agustus 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

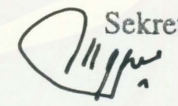
Ketua,

  
Dra. Sri Utami

NIP. 130 610 494




Sekretaris,

  
Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 131 658 376

Anggota,

  
Drs. Badjuri, ME.

NIP. 131 386 652

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

  
Drs. H. Sakusni, M.Sc.

NIP. 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten Dan  
Kotamadia Di Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I)  
(1996 - 1998)

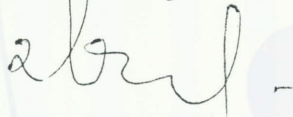
Nama Mahasiswa : L E N N Y

NIM : 960810101229

Jurusan : IESI

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan

Pembimbing I



Dr. H. Harjono, SU Ec.

NIP. 130 350 765

Pembimbing II



Drs. Badjuri, MS

NIP. 131 386 652

Ketua Jurusan



Dra Aminah

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 17 Juli 2000

*Skripsi ini kupercembahkan untuk :*

- ♥ *Papa-ku terkasih, Edy Hartono dengan keteguhan dan semangatnya dalam memotivasi keberhasilan anak-anaknya*
- ♥ *Mama-ku tersayang, Lily Chandra yang selalu mengasahi anak-anaknya dan tiada pernah surut akan pengharapan*
- ♥ *Kakak-kakak-ku dan Adik-ku se'duarga: Monique S (Aoi), Elizabeth Benedikta Erlina Sari, Antonius Sugianto, Brigitta Agnes Nanik Eryanti, Rafael M. Wijaya yang selalu memberikan dukungan material dan moral dalam menyelesaikan perkuliahan*

**MOTTO :**

Titah TUHAN itu tepat menyukakan hati ; perintah TUHAN itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya ; hukum-hukum TUHAN itu benar adalah semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua ; dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah (Mazmur 19 : 10 - 11).

"FESTINALENTE"

Bersantai Dalam Bergegas

(dalam Sidney Sheldon)

## ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan I Gerbangkertasusi la kurun waktu tahun 1996 – 1997.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Indeks Williamson yakni untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di Satuan Wilayah Pembangunan I sedangkan untuk mengukur tingkat pertumbuhan Satuan Wilayah Pembangunan I menggunakan rumus pertumbuhan dengan dasar PDRB.

Dari nilai Indeks Williamson SWP I untuk tahun 1996 – 1997 berturut-turut 0.79; 0.81; 0.72. Sedangkan nilai Indeks Williamson Jawa timur yang dilakukan oleh BPS berkisar antara 0.60 – 0.70. Jika kotamadia Surabaya dikeluarkan dari perhitungan ternyata Indeks Williamson menurun yakni 0.60; 0.61; 0.53. Kemudian dengan dikeluarkannya Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari perhitungan, nilai Indeks Williamson semakin menurun yakni 0.486; 0.493; 0.461. Pertumbuhan ekonomi di SWP I untuk tahun 1996 – 1998 dengan menggunakan Harga Konstan 1993 menurun drastis yaitu 9.53%; 5.63%; -1.67%.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di SWP I terjadi kesenjangan pendapatan ini terbukti bahwa perhitungan Indeks Williamson SWP I lebih besar jika dibandingkan dengan Indeks Williamson Jawa Timur. Tetapi dengan dikeluarkannya Kotamadia Surabaya dari perhitungan indeks Williamson SWP I maka pendapatan semakin merata, apalagi jika Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dikeluarkan dari perhitungan Indeks williamson SWP I ternyata pendapatan semakin lebih merata.

Kata Kunci : Pendapatan Perkapita (PDRB), Jumlah Penduduk.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Bapa di Surga, karena atas kasih dan kemurahanNYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : KESENJANGAN PENDAPATAN DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN I (SWP I), JAWA TIMUR KURUN WAKTU 1996 – 1998.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan program sarjana pada jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah banyak sumbangan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk, saran dan keterangan yang diberikan dan juga sumbangan materiil maupun moril untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Harjono, SU Ec, selaku pembimbing I dan Drs. Badjuri, ME selaku pembimbing II atas bimbingan, dukungan dan bantuan yang telah banyak membantu penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini
2. Drs. Sukusni, MSc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Drs. J. Sugiarto, SU, selaku Dosen wali Penulis.
3. Drs. Rafael S. Poertomo, MSi dan Dra. Aminah yang selalu siap membantu penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis
5. Gereja 'Santo Yusuf' , Bapa – Ibu Baktis, Romo Yustinus, Romo Anton, Ibu Reni, Bapak Alex yang membuat penulis benar-benar mantab dalam berbakti serta mengabdikan pada gereja dan ibu Peritiwi
6. Bernandus Iwan Santoso, SE yang selalu dengan kasih dan sabar mendampingi dalam setiap derap langkahku
7. Sahabat-sahabat kecil-ku Pe-Pe, Evoy, Umil, Lipang, Pengki, CH-ku tersayang

8. Rekan-rekan kost Jawa IV – 74 Yani, Yuyun, Yanti, Rida, Eros, Ira, Anink, Ipe, Nunu', Mevi dan lain-lain , terima kasih atas segala kebersamaan, perhatian, dukungan dan saling pengertian yang diberikan selama penulis berada di Jember
9. Rekan-rekan seperjuangan-ku Nita, Latri, Irma, Ajeng, Titik, Faruk, Edi, Erji, Prety, Kiki, Ari', Ri-rid dan teman-teman Perencanaan serta arek SP – GL 1996
10. Teman-teman-ku KKN Mlokorejo - Puger 1999

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat lebih bermanfaat.

Jember, Agustus 1999

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Landasan teori.....	6
2.2.1 Perekonomian Daerah.....	6
2.2.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah.....	7
2.2.3 Pengertian Daerah.....	9
2.2.4 Teori Kutub Dan Pusat Pertumbuhan.....	9
2.2.5 Kesenjangan Antar Daerah.....	10
2.2.6 Konsep Ruang Sebagai Titik Tolak Perencanaan.....	10
2.2.7 Konsep Dan Pengertian Ruang Ekonomi.....	12
2.2.8 Indeks Williamson.....	13

III.	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Rancangan Penelitian.....	14
3.2	Proses Pengumpulan Data.....	14
3.3	Definisi Operasional Dan Pengukurannya.....	14
3.4	Metode Analisis.....	15
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Satuan Wilayah Pembangunan I, Jawa Timur.....	17
4.2	Aspek Kependudukan.....	20
4.3	Pendapatan Perkapita.....	21
4.4	Aspek Perekonomian.....	22
4.5	Kesenjangan Pendapatan Di SWP I (1996 – 1998).....	22
4.6	Pertumbuhan Ekonomi Di SWP I (1996 – 1998).....	23
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	25
5.2	Saran – Saran.....	25
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten Dan Kotamadia Di SWP 1997(ha).....	20
2 Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten Dan Kotamadia di SWP I 1996 - 1997.....	21
3 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Dan Rata-Rata Perubahan Tahun Sub Sub di SWP 1 Atas dasar Harga Konstan Tahun 1995.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 1993 Sidoarjo.....	27
2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 1993 Mojokerto.....	28
3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 1993 Lamongan.....	29
4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 1993 Bangkalan.....	30
5 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 1993 Gresik.....	31
6 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kotamadia 1993 Mojokerto.....	32
7 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kotamadia 1993 Surabaya.....	33
8 Perhitungan Indeks Williamson SWP I (1996 – 1998).....	34
9 Perhitungan Indeks Williamson SWP I (1996 – 1998) Memperhitungkan Tanpa Kotamadia Surabaya.....	35
10 Perhitungan Indeks Williamson SWP I (1996 – 1998) Memperhitungkan Tanpa Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.....	36
i1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi SWP I Selama Kurun waktu 1996 – 1998 Berdasarkan PDRB Menurut Kabupaten dan Kotamadia Harga Konstan 1993.....	37

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Titik berat pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat (Garis-garis Besar Haluan Negara, 1993).

Salah satu hasil konkrit dari Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama (PJP I) di tanah air adalah pendapatan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang dan pengusaha sektor manufaktur didalam pembentukan output negara semakin besar. Namun dibalik semua keberhasilan ini pada tingkat makro kesenjangan ekonomi bukannya semakin kecil malahan semakin besar. Salah satu penyebabnya adalah karena proses pembangunan terlalu terpusat di kota-kota besar terutama Jakarta, Surabaya atau di Pulau Jawa saja dan kegiatan-kegiatan ekonomi terutama yang memiliki nilai tambah tinggi hanya dikuasai oleh sebagian masyarakat saja.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut maka sejak Repelita II penerapan Teori Pengembangan Wilayah telah dimulai yaitu dengan dilaksanakannya pusat-pusat pertumbuhan wilayah (*Growth Poles*) dengan jalan melakukan pengelompokan Wilayah Pembangunan Utama (WPU). Dalam Repelita IV pengelompokan wilayah pembangunan di Indonesia dibagi menjadi enam WPU dan tiga puluh delapan wilayah pengembangan.

Keenam WPU tersebut yakni WPU A terdiri dari Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dengan Medan sebagai pusat pengembangan. WPU B terdiri dari Propinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Lampung dan Palembang sebagai pusat pengembangan. WPU C terdiri dari Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan DKI Jakarta sebagai pusat

pengembangan. WPU D terdiri dari Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Surabaya sebagai pusat pengembangan. WPU E terdiri dari Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Ujung Pandang sebagai pusat pengembangan. WPU F terdiri dari Propinsi Maluku, Irian Jaya

Jika diperhatikan maka pengelompokan wilayah-wilayah pembangunan tersebut didasarkan atas penggabungan antara *Konsep Homogenous Region*, *Nodal Region* dan *Administratif Region*. *Konsep homogenous region*, yakni pengelompokan beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama, baik berupa kepadatan penduduk, problema sosial dan sebagainya. *Konsep nodal region*, yakni pengelompokan beberapa daerah yang memiliki keterikatan satu sama lainnya. *Konsep Administratif region*, yakni pengelompokan beberapa daerah berdasarkan kesatuan politik atau administratif (Budiharsono, 1994: 43).

Rencana lebih lanjut dijabarkan dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Untuk perencanaan pembangunan di Jawa Timur meliputi sembilan SWP, antara lain SWP I terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kotamadya Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan (gerbangkertasusila). SWP II terdiri dari Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. SWP III Banyuwangi. SWP IV terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo. SWP V terdiri dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kotamadya Probolinggo. SWP VI terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kotamadya Malang, Kotamadya Pasuruan. SWP VII terdiri dari Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kotamadya Kediri, Kotamadya Blitar. SWP VIII terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kotamadya Madiun. SWP IX terdiri dari kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban.

Dalam pembangunan wilayah tingkat industrialisasi dan pertumbuhan merupakan indikator yang paling banyak digunakan. Perkembangan Industri akan memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pada akhirnya keterkaitan itu akan membawa pertumbuhan ekonomi wilayah

Peran sektor industri sangat besar artinya bagi pembangunan ekonomi Jawa Timur. Distribusi spasial potensi industri mempunyai pola mengelompok pada wilayah tengah Propinsi Jawa Timur, khususnya SWP I, gerbangkertasusila SWP I sebagai pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya mempunyai potensi industri. Peningkatan ini didukung oleh keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh SWP gerbangkertasusila.

Dalam Pelita IV tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pada kenyataannya bahwa pertumbuhan dan pendapatan antar kabupaten /kotamadia (sub-sub) di SWP I masih menunjukkan gejala ketimpangan.

Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan merupakan strategi pembangunan negara yang diperlukan dalam melengkapi strategi pembangunan sektoral sehingga dengan dipadukannya strategi pembangunan regional dan sektoral tersebut diharapkan akan dapat menciptakan hasil-hasil pembangunan yang efisien dengan sasaran pembangunan yang tepat bagi setiap daerah. Pembentukan SWP tersebut mempunyai tujuan pokok, yaitu menunjukkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya, memperkokoh kesatuan ekonomi yang efisien dengan arah yang mendasar dari ke tiga tujuan pokok tersebut adalah untuk menuju pemerataan pembangunan daerah.

Pembentukan SWP I mempunyai harapan bahwa kegiatan pembangunan yang berpusat di kotamadya Surabaya mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan daerah belakangnya (hinterland), yang pada akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu ruang ekonomi.

Perbedaan tingkat pembangunan dan perkembangan pada suatu sub-sub SWP I disebabkan oleh adanya keunggulan komparatif dalam suatu sektor atau bidang tertentu yang dimiliki suatu sub SWP I dibandingkan sub SWP I lainnya. Keunggulan komparatif tersebut misalnya berupa tanah yang subur, luasnya areal pertanian, lembaga keuangan dan fasilitas lainnya yang banyak tersedia. Untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan pada sub-sub di SWP I, yaitu melalui *Spread Effect*, berupa pengaruh yang menguntungkan karena adanya perluasan aktivitas dari pusat pembangunan ekonomi di suatu daerah ke daerah sekitarnya, baik karena lakunya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru dan sebagainya (Bintoro Tjokroamidjojo, 1987:130), dan *Trickle Down Effect*, yang berupa menaikkan pembangunan bahan-bahan mentah serta menyerap pengangguran tersembunyi (Siagian, 1989:77).

Menurut formula Williamson dapatlah diketahui bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan turunnya pendapatan negara lainnya. Jadi pertumbuhan yang pesat secara keseluruhan akan mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan antar beberapa negara lainnya. Bila scope ini diperkecil maka dapatlah dikatakan bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau daerah di negara tersebut. Sedangkan alasan penulis mengadakan penelitian untuk kurun waktu tahun 1996 - 1998 adalah karena seperti telah kita ketahui bahwa di Indonesia terjadi "krisis moneter" pada pertengahan tahun 1997, yang menyebabkan perbedaan PDRB yang diperoleh di sub SWP I yaitu sebelum terjadinya "krisis moneter" (1996) dan saat terjadinya "krisis moneter" (1997 dan 1998).



## 1.2 Perumusan Masalah

Melihat kenyataan diatas, jelaslah bahwa terdapat kesenjangan pendapatan di daerah Satuan Wilayah Pembangunan I, Jawa Timur, sehingga permasalahan yang perlu dicermati adalah seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar sub di SWP I kurun waktu tahun 1996-1998 dan seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sub di SWP I kurun waktu tahun 1996-1998.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. tingkat kesenjangan pendapatan antar sub di SWP I kurun waktu tahun 1996-1998
- b. tingkat pertumbuhan ekonomi antar sub di SWP I kurun waktu tahun 1996-1998

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Sumbangan informasi bagi pemerintah didalam menentukan pola kebijakan daerah
- b. Bahan informasi bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan masalah ini

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Nurul Syamsiar, 1998 mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Jember dengan penelitiannya yang bertema Kesenjangan Pendapatan Di WPU.D (1993-1995) adalah Indeks Williamson pada daerah WPU.D ternyata relatif sama bila dibanding dengan Indeks Williamson Nasional, yaitu Indeks Williamson pada WPU.D berkisar antara 0.50-0.60, sedangkan Indeks Williamson Nasional berkisar antara 0.60-0.70 artinya kesenjangan pendapatan pada WPU.D sama bila dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan pada tingkat nasional. Hal ini disebabkan PDRB masing-masing propinsi jauh berbeda.

### 2.2 Landasan Teori

#### 2.2.1 Perekonomian Daerah

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara implisit dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah, karena ekonomi nasional tidak akan tumbuh tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kondisi seperti ini tidak mengherankan bila pertumbuhan menjadi salah satu tujuan pembangunan di daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk ada tidaknya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka pada gilirannya jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Arsyad, 1997:275)

### 2.2.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah tertetak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu memaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999:108).

Pada hakekatnya ada dua pengertian yang dapat dikaitkan dengan istilah pembangunan daerah ini:

- a. Pembangunan dalam suatu daerah (pembangunan lokal) yaitu pembahasan mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari penyebaran kegiatan ekonomi ke berbagai lokasi dalam suatu *economic space* atau ruang ekonomi tertentu.
- b. Pembangunan daerah di tinjau dari sudut ruang atau wilayah. Dalam hal ini strategis pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan struktural dari pembangunan nasional. Sehingga perlu mempertimbangkan strategi makro, strategi struktural dan strategi daerah atau wilayah. Masalah pokok yang harus dipecahkan dalam konteks ini antara lain di daerah mana berbagai program pembangunan sebaiknya dilaksanakan dan apakah proyek-proyek akan dijalankan secara menyebar keseluruh wilayah atau perlu dikonsentrasikan di berbagai daerah tertentu.

Perbedaan utama antara pengertian yang pertama dan kedua adalah terletak pada skala, fokus dan ruang lingkup pembangunan daerah atau wilayah dilakukan pada geografik yang lebih luas dari pembangunan lokal dan merupakan gabungan dari beberapa daerah perencanaan lokal. Jika pembangunan lokal lebih berkonsentrasi pada permasalahan dan komunitas lokal fokus pembangunan wilayah berhubungan dengan program-program dan proyek-proyek yang mempunyai implikasi pada berbagai daerah yang berbeda, tidak pada daerah tertentu.

Jika salah satu tujuan utama dari pembangunan daerah adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah maka sumber daya tambahan harus dialirkan pada daerah yang miskin sumber daya, dan ini hanya dapat dilakukan pada daerah Pemerintah Pusat. Tingkat propinsi tidak dapat melakukan hal ini untuk mencapai tujuan akhir yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah secara tepat guna, memerlukan prioritas daerah dan memiliki berbagai alternatif strategis dan kebijaksanaan pembangunan. Dengan demikian untuk memenuhi tujuan dari fungsi perencanaan daerah harus ada kapasitas perencanaan daerah baik ditingkat nasional maupun ditingkat propinsi.

### 2.2.3 Pengertian Daerah

Pengertian daerah perlu mendapat kualifikasi. Beberapa Departemen Pemerintah mempunyai pembagian daerah yang berbeda, masing-masing tentu saja berdasarkan pada pertumbuhan yang tidak selalu sama dan yang pada umumnya dikaitkan dengan perencanaan dan kepentingan sektor yang ditangani oleh departemen yang bersangkutan. Sebenarnya tidak mudah untuk menentukan pembagian daerah (regionalisasi) yang paling optimal, mengingat spesifikasi struktur regionalisasi selalu mencerminkan penderetan kriteria yang hampir tidak terpenuhi seluruhnya. Disamping itu ditinjau dari segi koordinasi operasional berdasarkan sistem politik atau administrasi pemerintah di Indonesia, berbagai kebijaksanaan yang didasarkan pada beberapa macam regionalisasi diperkirakan tidak mudah implementasinya. Itulah sebabnya tanpa mengurangi arti dari berbagai usaha perbaikan dalam pembuatan suatu sistem regionalisasi oleh berbagai pihak, unit daerah yang dipakai adalah satuan wilayah Perencanaan (SWP).

### 2.2.4 Teori Kutub Dan Pusat Pertumbuhan

Perkembangan teori kutub pertumbuhan bersumber dari ahli-ahli Perancis terutama Ferraroux. Istilah kutub pertumbuhan dipakai pada konsep asli pada Ferraroux tanpa dimensi geografik tetapi menggunakan ruang ekonomi (*Space economic*), sedangkan pusat pertumbuhan atau titik pertumbuhan berkaitan dengan lokasi spasial.

Ruang ekonomi mengandung pengertian pusat-pusat dan kutub-kutub yang mempunyai kekuatan *centrifugal* yang memancar kesekiling dan juga mempunyai kekuatan *centripetal* yang menarik daerah sekitarnya kepusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan penarik dan penolak dan mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat lain. Menurut Ferraroux unit ekonomi yang dominan akan tampil memainkan peran utama dalam ruang ekonomi. Unit ekonomi yang dominan disebut sebagai perusahaan pendorong.

Konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik dari pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dapat ditandai sebagai berikut:

- a. *Konsep Leading Industries* dan perusahaan propulsif, menyatakan bahwa pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan yang propulsif dan besar yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit ekonomi lainnya. Suatu perusahaan propulsif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Perusahaan tersebut relatif besar
- Dapat menimbulkan derangau yang nyata terhadap pertumbuhan
- Kemampuan untuk inovasi tinggi
- Termasuk dalam industri yang tumbuh cepat

Suatu *leading industries* mempunyai ciri-ciri yaitu:

- Relatif baru dan dinamis, serta mempunyai tingkat teknologi yang tinggi
- Permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas yang tinggi
- Mempunyai kaitan industri, kaitan ke depan (*forward linkages*) atau mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkages*)

- b. Konsep polarisasi bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit lainnya ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan
- c. *Konsep Spread Effect* menyatakan bahwa pada waktunya kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memengaruhi ruang sekitarnya.

#### 2.2.5 Kesenjangan Antar Daerah

Penjelasan mengenai kesenjangan antar daerah dalam perekonomian nasional merupakan fenomena dunia. Hal semacam ini terjadi pada semua negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari sumberdaya bawaan. Pada umumnya kesenjangan

antar daerah lebih tajam terjadi pada negara yang sedang berkembang karena kekakuan sosial ekonomi (*social rigidities*) dan faktor *immobilitas* (*factor immobilities*). Untuk mengatasi kesenjangan tersebut hampir semua negara menerapkan kebijakan khusus untuk membangun daerah terbelakang (Uppal dan Handoko, 1986:287).

Dalam membahas kesenjangan antar daerah ada dua teori yang perlu diperhatikan yaitu *Generative Growth Theory* dan *Comperative Growth Theory*. Dalam *generative growth theory*, menyatakan bahwa pada saat perekonomian bertambah secara mantap obyek permasalahan ekonomi dapat diselesaikan. Beberapa daerah tumbuh lebih cepat daripada daerah lainnya, namun sejauh semua daerah menikmati pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih cepat kalau laju pertumbuhan daerah ditingkatkan. *Comperative Growth Theory* berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan beberapa kekuatan eksogen, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tersebut seolah-olah dibagi kepada beberapa daerah. Situasi ini terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi nasional rendah. Pertumbuhan ekonomi beberapa daerah berlangsung dengan mengorbankan pertumbuhan lain.

### 2.2.6 Konsep Ruang Sebagai Titik Tolak Perencanaan

Konsep ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat secara terpisah, namun bila dilihat secara bersamaan akan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas tata ruang kegiatan manusia.

Unsur-unsur tata ruang yang penting antara lain: 1. jarak; 2. lokasi; 3. bentuk dan 4. ukuran atau skala. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah.

Tipologi suatu wilayah dapat digambarkan, yaitu:

- a. Gambaran tunggal suatu wilayah, yaitu persamaan suatu wilayah ditentukan oleh suatu fenomena, misalnya jenis tanah, agama dan sebagainya. Jika

wilayah ini merupakan unit yang terkecil dan dapat ditentukan batas-batas unit areal atau unit ruang.

- b. Gambaran majemuk dari suatu wilayah, yaitu batas wilayah dengan fenomena yang kompleks dengan beberapa persamaan didalamnya, terdiri dari suatu wilayah tetapi bila terdapat fenomena kompleks yang diperlukan sebagai penjelasan maka wilayah tersebut merupakan wilayah yang kompleks (Budiharsono, 1989:82)

### 2.2.7 Konsep Dan Pengertian Ruang Ekonomi

Ruang ekonomi didefinisikan berdasarkan atas hubungan ekonomi yang terdapat diantara elemen-elemen ekonomi. Abstraksi mengenai ruang ekonomi ini dibedakan atas tiga tipe:

- a. ruang didefinisikan untuk suatu rencana atau diagram
- b. ruang sebagai medan kekuatan
- c. ruang sebagai suatu keadaan yang homogen

Ruang sebagai suatu diagram meliputi pengertian suatu gugus kegiatan usaha, disatu pihak tersedianya faktor-faktor produksi sebagai bahan baku, tenaga kerja, modal dan pihak lain terdapat pembeli dari produksi(output). Pengukuran ruang berdasarkan harga dan ongkos serta posisi perusahaan tersebut terhadap struktur dengan kelompok perusahaan lain yang saling berkaitan.

Ruang sebagai medan kekuatan meliputi pengertian bahwa ruang ekonomi mempunyai pusat-pusat wilayah yang masing-masing kekuatan penarik dan penolak. Ruang sebagai kekuatan homogen meliputi hubungan kesamaan perusahaan terhadap unit-unit dan struktur perusahaan lain (Budiharsono, 1989:82)



### 2.2.8 Indeks Williamson

Indeks Williamson memberikan indikasi bahwa apabila nilainya semakin mendekati satu akan semakin timpang pembangunan suatu kabupaten/ kotamadia dan sebaliknya. Sebenarnya dalam melihat tingkat ketimpangan pembangunan suatu kotamadya/ kabupaten banyak ukuran yang dapat digunakan seperti kurve Lorenz. Namun dengan Indeks Williamson data yang dibutuhkan lebih sedikit sementara hasil yang diinginkan dipertanggungjawabkan, dimana dari analisis Lorenz kita dapat mengetahui pendapatan dari masyarakat. Jadi analisis Lorenz melihat pemerataan pendapatan (Budiharsono, 1989:82)



### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk Satuan Wilayah Pembangunan I (gerbangkertasusila), karena merupakan wilayah potensial untuk sektor perdagangan dan perhubungan

Keadaan ini dilihat dari arus barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan Tanjung Perak. Demikian pula dengan pelabuhan udara Juanda yang merupakan pelabuhan udara internasional tempat keluar masuk Jawa Timur, ini terlihat dari frekuensi pesawat dan penumpang yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

#### 3.2 Proses Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan instansi-instansi lain yang terkait pada penelitian ini.

#### 3.3 Definisi Operasional Dan Pengukurannya

Untuk menghindari meluasnya masalah dan terjadinya pengertian yang tidak tepat terhadap judul dan masalah yang dibahas, maka ditekankan pengertian dan batasan sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah adalah PDRB yang diterima oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. kesenjangan adalah perbedaan nilai Indeks Williamson yang diterima oleh Satuan Wilayah Pembangunan I di bandingkan dengan nilai Indeks Williamson yang diterima oleh Jawa Timur dalam jangka waktu tertentu. Dimana jika nilai Indeks Williamson SWP I lebih besar dari nilai Indeks Williamson Jawa Timur maka kesenjangan semakin besar dan sebaliknya

- c. Satuan wilayah Pembangunan I adalah pengelompokan Satuan Wilayah Pembangunan gerbangkertasusila yang masing-masing mempunyai pusat pengembangan.
- d. Penelitian ini merupakan penelitian analisis diskriptif
- e. Variabel yang digunakan untuk jumlah penduduk dan PDRB yang digunakan adalah kurun waktu 1996 - 1998

### 3.4 Metode Analisis

1. Untuk mengetahui adanya kesenjangan pendapatan antar Daerah pada Satuan Wilayah Pembangunan I digunakan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$vw = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i / n}{Y}}$$

Dimana:

Vw = Indeks Williamson

Y<sub>i</sub> = pendapatan perkapita kotamadya/ kabupaten ke-1 di SWP I

Y = pendapatan perkapita rata-rata di SWP I

f<sub>i</sub> = jumlah penduduk kotamadya/ kabupaten ke-i di SWP I

n = jumlah penduduk SWP I

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- nilai Indeks Williamson antara 0-1;
- jika nilai Indeks Williamson mendekati 1 berarti kesenjangan pendapatan di SWP I semakin besar atau ketimpangan semakin besar dan sebaliknya, semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin kecil

- jika nilai indeks Williamson wilayah SWP I > Indeks Williamson Jawa Timur berarti kesenjangan pendapatan di SWP I lebih besar dari kesenjangan pendapatan di Jawa Timur dan sebaliknya.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi antar sub di SWP I selama kurun waktu 1996 –1998 akan dipergunakan formulasi (Hera Susaanti, dkk, 1990:23):

Dimana:

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

G = Pertumbuhan ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun 1993

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Satuan wilayah Pembangunan I, Jawa Timur

Satuan Wilayah Pembangunan merupakan tuta ruang guna mensukseskan pemerataan pembangunan sebagai strategi pembangunan regional disamping strategi pembangunan sektoral maka dengan keberadaan Satuan Wilayah Pembangunan diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih efisien dan efektif.

Secara keseluruhan kebijaksanaan perwilayah Propinsi Jawa Timur dibagi menjadi sembilan Satuan Wilayah Pembangunan.(SWP). Tujuan yang hendak dicapai antara lain untuk mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap Satuan Wilayah Pembangunan (RUTR Jawa Timur 1992:44).

Salah satu Satuan Wilayah Pembangunan yang ada adalah SWP Gerbangkertasusila yakni merupakan wilayah pengembangan yang sangat padat penduduknya dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan fisik yang sangat tinggi, serta mempertimbangkan perannya sebagai pusat pengembangan Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur, maka dalam Rencana Tata ruang jawa Timur perlu ditetapkan konsepsi umum pengembangan wilayah (RUTR Jawa Timur, 1997:41).

Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertasusila mempunyai luas sebesar 5.795,8 KM<sup>2</sup>, dengan kegiatan utamanya meliputi pertanian, industri, perdagangan, jasa maritim dan industri pariwisata.

Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertasusila merupakan wilayah yang potensial untuk sektor perdagangan dan perhubungan. Keadaan ini dilihat dari arus barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan Tanjung Perak demikian pula dengan Pelabuhan Udara Juanda yang merupakan pelabuhan udara internasional tempat keluar masuk Jawa Timur, hal ini dapat dilihat dari frekuensi pesawat dan penumpang yang menunjukkan kecenderungan meningkat (RTR Jawa Timur,1997:15).

SWP Gerbangkertasusila meliputi:

### SURABAYA

Kotamadia Surabaya terletak diantara  $07^{\circ}12'$  sampai dengan  $07^{\circ}21'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}54'$  Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan laut, kecuali sebelah selatan membujur dari barat ke timur dua bukit landai yaitu Bukit Lidah dan Gayunagan dengan ketinggian 25 sampai 50 meter diatas permukaan air laut. Batas wilayah sebelah utara dengan Selat Madura, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat dengan Kabupaten Gresik. Penduduk di kotamadia Surabaya berjumlah 2.803.389 jiwa tercatat pada tahun 1998.

Kotamadia Surabaya merupakan pusat wilayah pengembangan SWP Gerbangkertasusila, Jawa Timur. Di Kotamadia Surabaya terdapat fasilitas yang sangat menunjang bagi pengembangan sektor-sektor yang ada, baik di Kotamadia Surabaya sendiri maupun bagi pengembangan SWP Gerbangkertasusila (RTR Jawa Timur, 1997:26)

### GRESIK

Kabupaten Gresik mempunyai luas daratan  $1.190,90 \text{ KM}^2$ . Kabupaten ini terdiri dari lima Wilayah Pembantu Bupati yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 356 desa dan 26 kelurahan.

Jumlah penduduk tahun 1998 tercatat 944.843 jiwa, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan penangkapan ikan (Sosenas, 1998:21).

Kabupaten ini berdasarkan komitmen nasional merupakan salah satu wilayah pengembangan zona industri khususnya industri kimia dan industri semen, selain itu letak geografis kabupaten ini menunjang perkembangan sektor industri yang akan dikembangkan (RTR Jawa Timur, 1997:31).

### BANGKALAN

Luas Kabupaten Bangkalan seluruhnya adalah  $1.265,60 \text{ KM}^2$ . Secara administratif terbagi menjadi lima Wilayah Pembantu Bupati dengan 18 kecamatan dan 281 desa serta 8 kelurahan (BPS,1998).

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1998 penduduknya tercatat 785.570 jiwa dengan kepadatan penduduk 578 jiwa per  $\text{KM}^2$ .

### MOJOKERTO

- Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Biro Pusat Statistik, 1998 luas wilayah Kabupaten Mojokerto tercatat  $692,50 \text{ KM}^2$ . Secara administratif kabupaten ini terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 304 desa dan 5 kelurahan. Pada tahun 1998 penduduknya berjumlah 850.986 jiwa dengan mata pencaharian masih tetap dibidang pertanian.

- Kotamadia Mojokerto

Kondisi geografis kotamadia ini berada pada dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 21 meter dari permukaan laut. Sebagian datarannya dipisahkan oleh Kali Brantas, Kali Brangkal dan Kali Comprot, Kali Ngayung dengan luas seluruhnya  $16,50 \text{ KM}^2$ .

Kotamadia Mojokerto terbagi menjadi dua kecamatan dengan 18 desa dan 12 kelurahan. Penduduknya pada tahun 1998 tercatat  $108.962 \text{ KM}^2$  (BPS, 1998).

### SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo terletak di pesisir Jawa Timur secara geografis berada pada  $112,4^{\circ} \text{ BT}$  dan  $7,3^{\circ}$  sampai  $7,5^{\circ} \text{ LS}$  dengan ketinggian 0 sampai 25 meter diatas permukaan laut. Kabupaten ini merupakan delta Brantas yang sangat subur karena diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Mas atau Kali Surabaya. Luas wilayah  $634,40 \text{ KM}^2$  dengan penduduk tercatat 1.440.452 jiwa pada tahun 1998.

Secara administratif kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 44 Wilayah Bupati yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan, dengan 353 desa dan 28 kelurahan. Sidoarjo sangat terkenal sebagai daerah atau kawasan industri kecil, sekalipun daerahnya sebagai daerah pertanian, pertambangan bandeng atau udang tetap menonjol (Profil Propinsi Jawa Timur, 1996).

### LAMONGAN

Kabupaten Lamongan mempunyai luas wilayah  $1.669,50 \text{ KM}^2$ . Secara administratif Kabupaten Lamongan tersebut terbagi menjadi enam wilayah pembantu

bupati yang terdiri dari 25 kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut terbagi menjadi desa dan kelurahan yang seluruhnya berjumlah 475 desa dan 8 kelurahan. Menurut hasil sensus penduduk 1998 penduduk Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 1.193.620 jiwa.

SWP Gerbangkertasusila terdiri dari berbagai kawasan. Penggunaan tanah seperti terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1: Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten dan Kotamadia di SWP 1 1997 (Ha)

Kabupaten dan Kotamadia	Pekarangan Tanah untuk Bangunan dan Halaman	Tegal, kebun, Ladang, huma	Lahan Pengembalaan Padang Rumput	Tambak	Kolam Tebat
Kab. Gresik	12.173	23.194	-	21.713	293
Kab. Bangkalan	15.980	51.885	61.885	2.102	319
Kab. Mojokerto	14.168	11.524	11.524	-	8
Kod. Mojokerto	870	35	-	-	3
Kod. Surabaya	15.485	2.058	-	735	122
Kab. Sidoarjo	18.391	479	-	14.273	557
Kab. Lamongan	12.957	28.242	2	652	-
Jumlah	89985	133417	73412	39475	1302

Sumber : EPS, 1998

#### 4.2 Aspek Kependudukan

Pada tahun 1996 jumlah penduduk SWP telah mencapai 7.257.150 jiwa. Dari jumlah tersebut yang terbesar berdomosili di Kotamadia Surabaya sebesar 2.344.150, Kabupaten Lamongan sebesar 1.180.849, Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.142.415, Kabupaten bangkalan sebesar 725.653 dan terakhir Kotamadia Mojokerto sebesar 105.401. Pada tahun 1997 terjadi peningkatan penduduk di SWP I yakni sebesar 7.323.632 jiwa dan tahun 1998 jumlah penduduk SWP I, Jawa Timur telah mencapai 8.127.822 jiwa.



Tabel 4.2 : Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten & Kotamadia di SWP I 1996 – 1997

Kabupaten dan Kotamadia	Luas (Km <sup>2</sup> )	1996 (00 Jiwa)	1997 (00 Jiwa)
Kab. Gresik	1.191	764	772
Kab. Bangkalan	1.266	573	578
Kab Mojokerto	693	1.224	1.241
Kod. Mojokerto	17	6.388	6.432
Kod. Surabaya	326	7.183	7.220
Kab. Sidoarjo	634	1.801	1.836
Kab. Lamongan	1.670	707	710

Sumber : EPS 1998

### 4.3 Pendapatan Perkapita

Hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat dapat terlihat dari tingkat pendapatan perkapita yang dihitung tiap tahun dalam satu periode. Pendapatan perkapita digunakan sebagai tolok ukur bagi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat meskipun masih belum dapat mencerminkan adanya perolehan pendapatan yang sebenarnya yang diterima oleh masyarakat, dengan kata lain hal-hal yang bersifat sosial atau kualitatif kurang diperhitungkan. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di SWP I dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 : Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Rata-Rata Perubahan Tahun Sub-Sub Di SWP I Tahun 1996 Atas dasar Harga Konstan Tahun 1993

No	Satuan wilayah Pembangunan I	Pertumbuhan (%)
1.	Kabupaten Gresik	2
2.	Kabupaten Bangkalan	2.7
3.	Kabupaten Mojokerto	2.5
4.	Kotamadia Mojokerto	5.4
5.	Kotamadia Surabaya	6.3
6.	Kabupaten Sidoarjo	5.3
7.	Kabupaten Lamongan	2.6

Sumber : BPS DATI I Jawa Timur

Berdasarkan tabel terlihat bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita perubahan-perubahan tahun pada sub-sub SWP I menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi terutama Kotamadia Surabaya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6.3% per tahun. Tingkat pertumbuhan perkapita Kotamadia Mojokerto sebesar 5.4%, Kabupaten Sidoarjo sebesar 5.3%, Kabupaten Bangkalan sebesar 2.6%, Kabupaten Mojokerto sebesar 2.5% dan kabupaten Gresik sebesar 2%.

#### 4.4 Aspek Perekonomian

Secara kuantitatif besarnya sumbangan-sumbangan pendapatan dari berbagai sektor di SWP I yang terbesar dihasilkan oleh Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Persewaan (lihat lampiran 1-7).

#### 4.5 Kesenjangan Pendapatan Di SWP I (1996 – 1998)

Indeks Williamson ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan pendapatan antar daerah. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud kesenjangan pendapatan bukanlah kesenjangan pendapatan pendapatan per orang tetapi kesenjangan pendapatan suatu daerah, sebab alat ukur yang digunakan berbeda. Untuk kesenjangan antar penduduk lazim digunakan Gini Ratio.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik bekerja sama dengan LPFM UI tahun 1996-1998 menemukan bahwa Indeks williamson Jawa Timur sebesar 0.60 sampai dengan 0.70

Dari perhitungan yang dilakukan untuk mencari Indeks Williamson SWP I sejak tahun 1996 – 1998 ditemukan secara berturut-turut yakni, 0.79, 0.81, 0.73 (terlihat pada tabel lampiran 1), maka terlihat bahwa nilai Indeks Williamson SWP I lebih besar dibandingkan dengan nilai Indeks Williamson Jawa Timur. Berarti kesenjangan pendapatan di SWP I lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan di Jawa Timur.



Untuk itu dengan mencoba mengeluarkan daerah yang memiliki PDRB terbesar (Kotamadia Surabaya kemudian Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo). Ternyata Indeks Williamson menurun yaitu berturut-turut 0.58; 0.61; 0.53. Dengan dikeluarkannya Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo maka Indeks Williamson menurun lagi yakni 0.485; 0.493; 0.461. Dari angka-angka tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata dengan mengeluarkan daerah dengan PDRB terbesar kesenjangan di SWP I menjadi lebih kecil atau dengan kata lain pendapatan antar daerah di SWP I lebih merata.

Dalam temuannya Williamson juga menyatakan bahwa semakin pesat pertumbuhan ekonomi dimana dukungan sektor industri sangat besar, maka jika suatu daerah tertentu belum mampu mengikuti pertumbuhan daerah lainnya yang lebih maju akan terjadi disparitas (kesenjangan) yang akan terus semakin melebar, karena disamping daerah tersebut kurang memajukan untuk mengejar pesatnya pertumbuhan wilayah, juga daerah tersebut akan ditinggal oleh penduduk yang lebih produktif untuk berpindah pada daerah yang memberikan lapangan kerja lebih baik. Jika hal itu terjadi maka jelaslah bahwa daerah yang terbelakang akan semakin tertinggal karena yang tinggal didaerah tersebut hanyalah orang-orang yang tidak produktif yang tidak mempunyai kekuatan atau daya guna memajukan daerahnya. Sedangkan daerah maju terutama daerah dimana dukungan sektor industri sangat besar akan semakin berkembang karena semakin banyak tenaga produktif tinggal didaerah tersebut yang datang dari daerah-daerah lain.

Dari situasi tersebut dapatlah dikatakan bahwa pertumbuhan yang pesat dari ke dua daerah tersebut mengakibatkan kesenjangan yang lebar di SWP I. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan yang pesat yang pada sisi lain pemerataan akan menjadi korban.

#### 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Di SWP I (1996–1998)

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi baik untuk suatu negara maupun wilayah adalah pertumbuhan ekonomi.

Kendatipun indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi SWP I berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 selama kurun Waktu 1996 – 1998 adalah 9.33%; 5.63%; -19.98%. SWP I yang merupakan pintu gerbang kertas usaha, pada tahun 1996 mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9.33%, tetapi pada tahun 1997 pertumbuhan turun menjadi 5.63%. Bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan semakin turun drastis yakni -19.98%. Hal ini dapat dimaklumi karena pada pertengahan tahun 1997 kondisi perekonomian sudah mulai menurun, disamping melonjaknya kurs dolar Amerika, juga akibat memburuknya ekonomi Indonesia (adanya krisis moneter yang melanda Asia terutama Indonesia). Dalam hal pertumbuhan, ada satu hal yang menarik. Ada kecenderungan wilayah-wilayah yang pada masa lalu biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi (SWP I) akibat krisis menjadi wilayah-wilayah yang kontraksinya cenderung paling tinggi pula. SWP mempunyai kontribusi ekonomi terbesar ternyata mengalami kontraksi yang paling hebat. Akibatnya adalah apabila pada masa sebelum krisis SWP I ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sebaliknya pada saat krisis SWP I dapat dikatakan sebagai penyumbang kontraksi yang paling tinggi pula. Wilayah-wilayah yang sektor primernya (pertaniannya) masih dominan ternyata relatif tidak terlanda krisis seperti yang dialami daerah-daerah yang sektor sekunder dan tersiernya sudah cukup kuat. Pada dua sektor yang disebut terakhir, tingkat ketergantungan terhadap luar negeri sangat kuat. Akibatnya pada saat nilai rupiah merosot terhadap nilai mata uang asing, ekonominya juga terimbas secara nyata (BPS, 1998)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

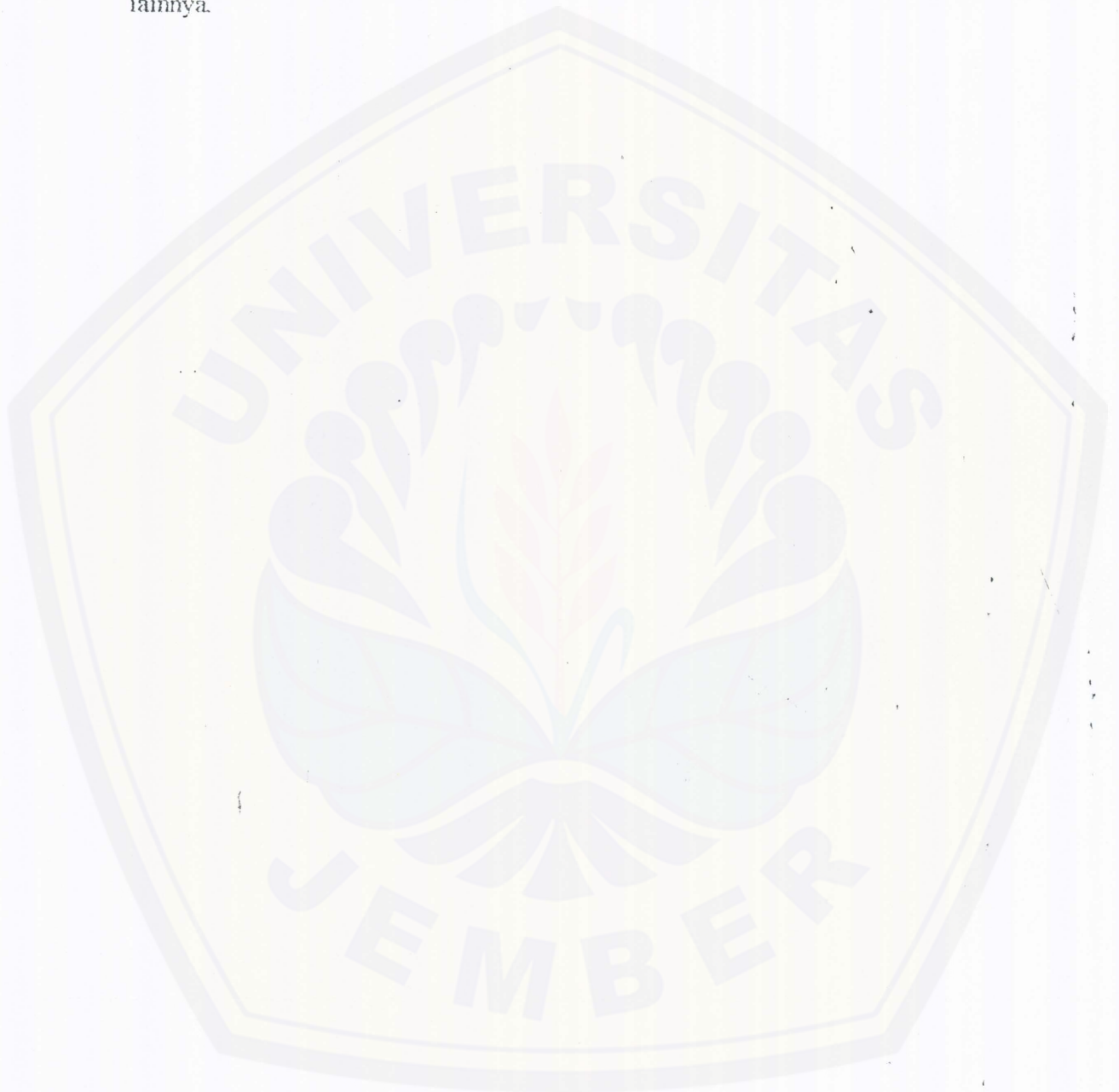
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah disimpulkan:

1. Dari nilai Indeks Williamson SWP I untuk tahun 1996 – 1998 berturut-turut 0.79; 0.81; 0.72. Sedangkan nilai Indeks Williamson Jawa Timur yang dilakukan oleh BPS berkisar antara 0.60 – 0.70. Jadi terbukti kesenjangan pendapatan di SWP I lebih besar dari kesenjangan pendapatan di Jawa Timur. Jika Kotamadia Surabaya dikeluarkan dari perhitungan ternyata nilai Indeks Williamson menurun yakni 0.57; 0.61; 0.53. Kemudian dengan dikeluarkannya Kotamadia Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari perhitungan, nilai Indeks Williamson semakin menurun yakni 0.486; 0.493; 0.461. Hal ini membuktikan bahwa daerah-daerah yang mempunyai sektor industri dan daerah-daerah yang PDRB-nya tinggi dikeluarkan dari perhitungan ternyata nilai indeks Williamson menurun dan dengan timbulnya daerah-daerah industri mengakibatkan terdapat daerah-daerah yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhannya.
2. Pertumbuhan ekonomi di SWP I untuk tahun 1996 – 1998 dengan menggunakan Harga Konstan 1993 menurun drastis yaitu 9.33%; 5.63%; -19.98%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah -1.67%.

### 5.2 Saran-Saran

1. Perlunya penyetaraan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada tidak menimbulkan dualistik ekonomi dimana tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah semakin tinggi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu perlu dicari pola pertumbuhan ekonomi yang dapat menekan kesenjangan pendapatan antar daerah.

3. Perlu diperhatikan tentang pola kebijaksanaan yang memusatkan kegiatan ekonomi disuatu daerah, karena daerah tersebut semakin eksklusif dan semakin jauh dari daerah-daerah lainnya. Secara global keadaan semacam ini akan merugikan daerah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Linc Min, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Daerah*, BPE, Yogyakarta.
- , 1997, *Ekonomi Pembangunan*, BPE, Yogyakarta
- Azis, Iwan J. , 1985. *Pembangunan Daerah aan Aspek Alokasi Dan Investasi Antar Daerah*, Prisma 5:4-21.
- BPS, 1997, *Jawa Timur Dalam Angka 1997 (East Java In Figures)*.  
-----Kantor Statistik dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur (Statistic Office Of East Java and The Government Of East)  
-----PDRB menurut Kabupaten/ Kotamadya Se Jawa Timur, Kerja Sama Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur oleh Bappeda Tingkat I Jawa Timur.
- Budiharsono, Sugeng, 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, LPFE, Jakarta.
- Hera, Susanti , Mohammad Ikhsan dan Widyati, 1994. *Indikator-Indikator Ekonomi*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Kamaluddin , 1973. *Pembangunan Daerah di Indonesia*, Lembaga Penelitian Daerah, Universitas Andalas.
- Sukirno, Sadono , 1985. *Ekonomi Pembangunan*, LPFE-UI dan Bina Grafika, Jakarta.
- Syafrizal, 1983. *Ekonomi Regional: Suatu Perkembangan dalam Ilmu Ekonomi*, EKI, Vol. XXXI No.2
- Tjokroamidjojo, Bintoro , 1987. *Perencanaan pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta.



**KABUPATEN SIDOARJO**

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
Pertanian	249018.10	248382.80	225662.58
Tanaman Bahan Makanan	65005.06	60198.95	61541.76
Tanaman Perkebunan	71398.88	67868.97	41599.17
Peternakan	27673.99	30359.04	30861.00
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	84940.17	90435.84	91660.65
Pertambangan dan penggalian	4311.70	3288.69	1102.08
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non-migas	-	-	-
Penggalian	4311.70	3288.69	1102.08
Industri Pengolahan	2556304.38	2765851.10	2012744.24
Makanan, Minuman dan Tembakau	463703.71	509783.49	302962.18
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	564961.92	608314.38	496436.32
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	121659.07	127494.31	102833.76
Kertas dan Barang Cetak	528593.91	558168.70	341204.75
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	16729.35	15350.89	14187.28
Semen dan barang galian bukan Logam	125640.95	134647.85	111998.76
Logam dasar Besi dan baja	175201.76	508825.31	365985.44
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	245169.43	283816.72	251060.68
Barang lainnya	14404.10	16149.45	16078.07
Listrik, gas dan Air Bersih	214922.19	207493.40	213941.95
Listrik	208914.76	200761.70	206736.77
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	6007.43	6731.70	7205.18
Konstruksi	345258.45	351792.27	215512.08
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1231731.97	1307706.59	1078755.81
Perdagangan	1121066.38	1178967.10	966801.55
Hotel	3940.80	3970.19	3760.69
Restoran	106724.78	124769.30	108213.57
Pengangkutan dan Komunikasi	362804.50	363564.86	285518.20
Angkutan	323681.68	320133.57	232911.77
Angkutan Rel	11072.93	1147.68	1565.34
Angkutan Jalan raya	118512.60	114179.38	107815.97
Angkutan Laut	-	-	-
Angkutan Penyebrangan	-	-	-
Angkutan Udara	181644.12	181689.90	101174.21
Jasa Penunjang Angkutan	22452.02	23117.61	22356.25
Komunikasi	39122.81	43531.29	52606.43
Pos dan Telekomunikasi	38122.81	42379.57	50938.52
Jasa Penunjang Komunikasi	909.33	1151.32	1667.91
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	188710.58	296274.84	177237.38
Bank	15380.89	15398.34	10289.42
Lembaga Keuangan Bukan Bank	6945.41	9237.05	7301.27
Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
Sewa Bangunan	44097.34	46072.30	40398.03
Jasa Perusahaan	122286.94	129567.16	119248.66
Jasa-jasa	239661.38	248396.12	247681.44
Pemerintahan Umum	95870.87	96429.97	92550.02
Swasta	143790.51	151966.16	155131.42
Jasa Sosial Kemasyarakatan	33374.56	37188.52	31369.14
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	841.68	917.76	635.61
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	109574.28	113859.87	123126.67
Produk Domestik Regional Bruto	5392723.23	5698350.67	4458175.75
<i>PDRB Jawa Timur</i>	61752469.04	64853573.88	54336273.28



## KABUPATEN MOJOKERTO

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
<b>Pertanian</b>	<b>220901.41</b>	<b>223369.40</b>	<b>214279.32</b>
Tanaman Bahan Makanan	130105.43	127933.59	131589.94
Tanaman Perkebunan	49378.59	49130.10	39930.69
Peternakan	39183.32	44121.45	40702.69
Kehutanan	2040.45	1976.98	1823.17
Perikanan	193.62	207.27	232.83
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	<b>71320.02</b>	<b>61873.75</b>	<b>41154.21</b>
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non-migas	-	-	-
Penggalian	71320.02	61873.75	41154.21
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>227120.16</b>	<b>241837.14</b>	<b>166101.88</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	88241.09	96405.19	59953.50
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6950.89	7103.01	4498.27
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	29781.44	31104.08	24306.46
Kertas dan Barang cetakan	70865.37	72712.64	46713.07
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	1452.65	1676.16	1318.18
Sernan dan Barang Balian bukan Logam	20466.40	21531.67	18281.72
Logam dasar Besi dan baja	596.02	665.58	440.66
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	8263.92	10047.92	10000.30
Barang lainnya	502.38	590.78	589.72
<b>Listrik, gas dan Air Bersih</b>	<b>25674.19</b>	<b>25319.58</b>	<b>24128.17</b>
Listrik	25153.32	24753.15	23526.33
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	520.26	566.42	601.84
<b>Konstruksi</b>	<b>130330.05</b>	<b>132877.96</b>	<b>97255.90</b>
<b>perdagangan, Hotel dan Restoran</b>	<b>263267.46</b>	<b>281635.80</b>	<b>233679.34</b>
Perdagangan	258574.67	276638.72	229215.58
Hotel	2479.00	2543.08	2451.91
Restoran	3313.78	2434.08	2011.86
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>55815.65</b>	<b>54615.33</b>	<b>51671.57</b>
Angkutan	50753.92	48817.49	45133.73
Angkutan Rel	-	-	-
Angkutan Jalan raya	40774.83	38593.09	35020.86
Angkutan Laut	-	-	-
Angkutan Penyebrangan	-	-	-
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	9979.10	10224.41	10112.87
Komunikasi	5061.73	5797.83	6537.84
Pos dan Telekomunikasi	4563.97	5196.64	6745.12
Jasa Penunjang Komunikasi	497.76	601.19	772.71
<b>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>55049.24</b>	<b>56395.56</b>	<b>52613.21</b>
Bank	865.96	951.71	589.61
Lembaga Keuangan Bukan Bank	10652.17	8514.68	7088.04
Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
Sewa Bangunan	27824.53	23203.30	27139.30
Jasa Perusahaan	15726.58	17725.88	17769.27
<b>Jasa-jasa</b>	<b>140942.56</b>	<b>144503.75</b>	<b>142932.06</b>
Pemerintahan Umum	73512.39	73280.86	70264.02
Swasta	67430.17	71222.88	72668.04
Jasa Sosial Kemasyarakatan	17720.96	19351.53	16171.53
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	161.81	173.34	44.17
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	49547.40	51698.01	56452.34
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>1190420.74</b>	<b>1222428.25</b>	<b>1023815.67</b>
<i>PDRB Jawa Timur</i>	<i>61752469.04</i>	<i>64853575.88</i>	<i>54336273.28</i>

## KABUPATEN LAMONGAN

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
Pertanian	448091.67	453356.06	448056.88
Tanaman Baku Makanan	323091.71	325098.44	321625.23
Tanaman Perkebunan	21.674.47	22007.09	18801.23
Peternakan	19565.02	22156.06	17404.16
Kelutanan	10933.62	10848.07	10463.73
Perikanan	72526.85	78246.41	80062.51
Pertambangan dan penggalian	2638.25	2885.66	1253.50
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non-migas	-	-	-
Penggalian	2638.25	2885.66	1253.50
Industri Pengolahan	6169.78	6660.81	4890.77
Makanan, Minuman dan Tembakau	2627.52	2813.44	1900.56
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1425.73	1435.28	1260.34
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	682.58	700.97	499.81
Kertas dan Barang cetakan	19.09	20.45	13.01
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	100.07	116.66	88.07
Semen dan Barang Balian bukan Logam	1101.27	1181.59	976.90
Logam dasar Besi dan baja	39.62	43.75	-
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	32.61	37.43	-
Barang lainnya	141.30	161.16	152.09
Listrik, gas dan Air Bersih	7383.90	7198.37	7393.15
Listrik	6622.89	6405.08	6785.67
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	761.01	793.29	607.48
Konstruksi	53997.19	56215.31	32067.24
perdagangan, Hotel dan Restoran	154509.79	164642.46	133558.27
Perdagangan	151649.58	161647.28	131395.04
Hotel	1175.24	1181.24	1045.39
Restoran	1684.97	1813.95	1116.84
Pengangkutan dan Komunikasi	28385.60	28907.32	28493.87
Angkutan	22905.36	22734.78	21936.64
Angkutan Rel	404.98	423.14	559.03
Angkutan Jalan raya	14515.28	14088.15	13303.52
Angkutan Laut	-	-	-
Angkutan Penyebrangan	-	-	-
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	7985.10	8223.49	8074.09
Komunikasi	5480.25	6172.54	6557.23
Pos dan Telekomunikasi	5057.42	5664.73	5871.36
Jasa Penunjang Komunikasi	422.83	507.82	685.87
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	54945.63	54400.78	45060.16
Bank	665.59	728.43	474.20
Lembaga Keuangan Bukan Bank	16655.20	14786.00	10662.10
Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
Sewa Bangunan	36384.70	37466.64	32569.77
Jasa Perusahaan	1240.14	1419.72	1354.10
Jasa-jasa	194412.35	198793.60	174195.08
Pemerintahan Umum	96588.17	96998.39	93217.11
Swasta	97824.18	101795.21	80977.97
Jasa Sosial Kemasyarakatan	38205.94	40574.35	33063.62
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	90.98	98.84	40.21
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	59527.25	61122.03	47874.14
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>950534.16</b>	<b>978060.37</b>	<b>875268.93</b>
<i>PDRB Jawa Timur</i>	61752469.04	64853575.88	54336273.28

## KABUPATEN BANGKALAN

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
Pertanian	282542.88	289166.89	276277.08
Tanaman Bahan Makanan	195604.50	184736.75	185612.08
Tanaman Perkebunan	12217.74	13383.09	9851.79
Peternakan	61010.15	67417.56	55224.73
Kehutanan	3463.78	3388.24	3071.92
Perikanan	19746.72	20241.26	22516.03
Pertambangan dan penggalian	754.00	603.53	450.20
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non-migas	-	-	-
Penggalian	754.00	603.53	450.20
Industri Pengolahan	4356.13	4690.99	3928.04
Makanan, Minuman dan Tembakau	1291.57	1249.38	791.42
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	937.45	934.19	779.59
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	49.74	52.13	39.04
Kertas dan Barang cetakan	-	-	-
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	86.93	101.38	78.19
Semen dan Barang Balian bukan Logam	156.14	160.77	145.25
Logam dasar Besi dan baja	-	-	55.24
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	-	150.72	-
Barang lainnya	1834.31	2042.42	2039.31
Listrik, gas dan Air Bersih	4703.83	4863.67	5036.31
Listrik	4005.95	4107.63	4200.59
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	698.78	756.04	835.74
Konstruksi	29625.10	30053.17	23459.63
perdagangan, Hotel dan Restoran	153433.04	159837.33	124306.43
Perdagangan	150137.86	156350.09	121012.68
Hotel	636.61	652.83	583.99
Restoran	2658.56	2834.41	2704.76
Pengangkutan dan Komunikasi	46894.24	46613.40	44672.50
Angkutan	43085.96	42291.08	39902.52
Angkutan Rel	-	-	-
Angkutan Jalan raya	31073.02	26459.60	27066.96
Angkutan Laut	4061.52	4485.69	5027.69
Angkutan Penyeberangan	5269.08	5505.05	5007.18
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	2682.35	2940.73	2800.69
Komunikasi	3808.28	4327.35	4769.98
Pos dan Telekomunikasi	3576.63	4041.15	4439.01
Jasa Penunjang Komunikasi	231.65	281.18	330.97
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	41263.07	42070.40	36182.07
Bank	3786.72	4156.00	2695.09
Lembaga Keuangan Bukan Bank	7503.20	6890.14	5722.67
Jasa Penunjang Keuangan	27766.88	-	-
Sewa Bangunan	2206.27	28671.89	25583.98
Jasa Perusahaan	108868.08	2352.38	2180.37
Jasa-jasa	70222.09	111588.30	108158.32
Pemerintahan Umum	38645.99	70636.66	68663.99
Swasta	16278.84	40951.65	39494.33
Jasa Sosial Masyarakat	30.39	17702.38	14866.21
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	22336.76	33.08	15.85
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	672440.37	23216.19	24612.27
Produk Domestik Regional Bruto	950534.16	689487.68	622470.27
<i>PDRB Jawa Timur</i>	61752469.04	64853575.88	54336273.28

**KABUPATEN GRESIK**

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
<b>Pertanian</b>	<b>335588.26</b>	<b>337157.38</b>	<b>324366.80</b>
Tanaman Bahan Makanan	173215.23	160530.60	158485.78
Tanaman Perkebunan	13324.74	14456.68	12767.14
Peternakan	46594.59	50743.29	41228.77
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	101953.71	111427.01	111835.11
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	<b>327224.73</b>	<b>269949.72</b>	<b>94798.32</b>
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non -migas	-	-	-
Penggalian	327224.73	269649.72	94798.32
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1609653.92</b>	<b>763549.91</b>	<b>333798.24</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	179933.84	223770.75	127772.44
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	52657.85	53086.07	36591.93
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	520053.92	544436.71	358929.20
Kertas dan Barang cetakan	108161.77	117164.83	111975.34
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	148192.52	170017.99	130521.68
Semen dan Barang Balian bukan Logam	443403.32	469017.82	394647.59
Logam kasar Besi dan baja	222752	2421.72	2382.88
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	154876.13	183463.30	170811.55
Barang lainnya	147.05	170.71	164.63
Listrik, gas dan Air Bersih	72138.95	72204.09	68579.83
Listrik	70825.72	70749.70	67039.93
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	1313.23	1454.39	1539.90
<b>Konstruksi</b>	<b>151419.11</b>	<b>158982.40</b>	<b>115731.76</b>
perdagangan, Hotel dan Restoran	607694.26	651268.34	544100.06
Perdagangan	597186.48	639573.56	534510.18
Hotel	642.73	1683.48	1716.83
Restoran	8865.06	10003.70	7873.06
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>129550.77</b>	<b>133180.94</b>	<b>139941.25</b>
Angkutan	101564.30	110048.30	111827.98
Angkutan Rel	127.68	135.05	175.32
Angkutan Jalan raya	63752.03	60583.97	57620.71
Angkutan Laut	25437.53	26360.29	33919.52
Angkutan Penyeberangan	3348.25	3475.10	3127.23
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	16898.82	17487.81	16985.20
Komunikasi	19986.47	23132.64	28719.75
Pos dan Telekomunikasi	19198.95	21132.81	1393.51
Jasa Penunjang Komunikasi	787.51	999.83	1393.51
<b>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>135451.96</b>	<b>150391.80</b>	<b>133248.54</b>
Bank	6884.15	7445.80	4731.81
Lembaga Keuangan Bukan Bank	29643.68	32175.16	22823.79
Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
Sewa Bangunan	27863.92	28724.04	25093.93
Jasa Perusahaan	71060.21	82043.81	80599.01
<b>Jasa-jasa</b>	<b>164653.04</b>	<b>169215.45</b>	<b>161043.68</b>
Pemerintahan Umum	30065.59	81218.42	77562.57
Swasta	80587.45	87997.02	83481.11
Jasa Sosial Masyarakat	31435.18	33671.71	26728.09
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	488.64	536.26	243.06
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	52663.63	53789.05	56509.96
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>3533375.00</b>	<b>3705592.31</b>	<b>622470.27</b>
<i>PDRB Jawa Timur</i>	<i>61752469.04</i>	<i>64853575.88</i>	<i>54335273.28</i>

Tabel : 4.14 PDRD Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Konstan 1993

**KOTAMADIA MOJOKERTO**

Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
<b>Pertanian</b>	<b>6107.18</b>	<b>6105.59</b>	<b>5719.79</b>
Tanaman Bahan Makanan	2225.38	2176.16	2109.15
Tanaman Perkebunan	-	-	-
Peternakan	2789.05	2816.10	2431.59
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	1092.76	1113034	1179.06
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	-	-	-
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non -migas	-	-	-
Penggalian	-	-	-
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>37225.96</b>	<b>39934.81</b>	<b>18470.40</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	6945.09	8772.37	5320.89
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	26638.56	27031.65	11238.85
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	779.12	814.43	468.34
Kertas dan Barang cetakan	562.46	592.61	456.05
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	644.83	716.41	541.86
Semen dan Barang Balian bukan Logam	451.28	503.96	-
Logam dasar Besi dan baja	-	153.55	-
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	956.81	1097.69	-
Barang lainnya	228.80	257.13	58829.14
Listrik, gas dan Air Bersih	53960.28	54176.38	244.40
Listrik	53789.93	53989.55	<b>58653.53</b>
Gas Kota	-	-	-
Air Bersih	173.35	186.83	175.61
<b>Konstruksi</b>	<b>16984.31</b>	<b>17303.73</b>	<b>13352.82</b>
perdagangan, Hotel dan Restoran	83238.91	89159.52	69150.25
Perdagangan	73211.48	78040.87	60884.58
Hotel	2685.81	2176.60	2869.74
Restoran	7341.62	8402.06	5396.03
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>51783.25</b>	<b>55300.11</b>	<b>53709.75</b>
Angkutan	45631.68	45042.01	42058.84
Angkutan Rel	667.26	689.69	930.52
Angkutan Jalan raya	37167.38	29927.48	26302.40
Angkutan Laut	-	-	-
Angkutan Penyeberangan	-	-	-
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	13897.03	14433.84	14525.92
Komunikasi	9151.57	10558.10	11063.07
Pos dan Telekomunikasi	8786.87	10102.02	11650.92
Jasa Penunjang Komunikasi	264.71	456.08	587.85
<b>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>21257.18</b>	<b>20415.50</b>	<b>18269.80</b>
Bank	7820.71	8007.96	5030.80
Lembaga Keuangan Bukan Bank	4698.82	4314.6	3921.40
Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
Sewa Bangunan	3556.98	3674.39	4858.98
Jasa Perusahaan	4189.68	4418.51	4458.63
Jasa-jasa	39128.74	40017.58	39585.54
Pemerintahan Umum	21846.58	21731.11	21218.35
Swasta	17282.17	18286.47	18367.19
Jasa Sosial Kemasyarakatan	4425.92	4872.92	3861.59
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	141.89	153.47	121.39
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	12714.36	13260.08	14384.21
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>311685.82</b>	<b>322713.22</b>	<b>277087.21</b>
<i>PDRB Jawa Timur</i>	<i>61752469.04</i>	<i>64853575.88</i>	<i>54336273.28</i>

Tabel 4.15 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993

**KOTAMADIA SURABAYA**

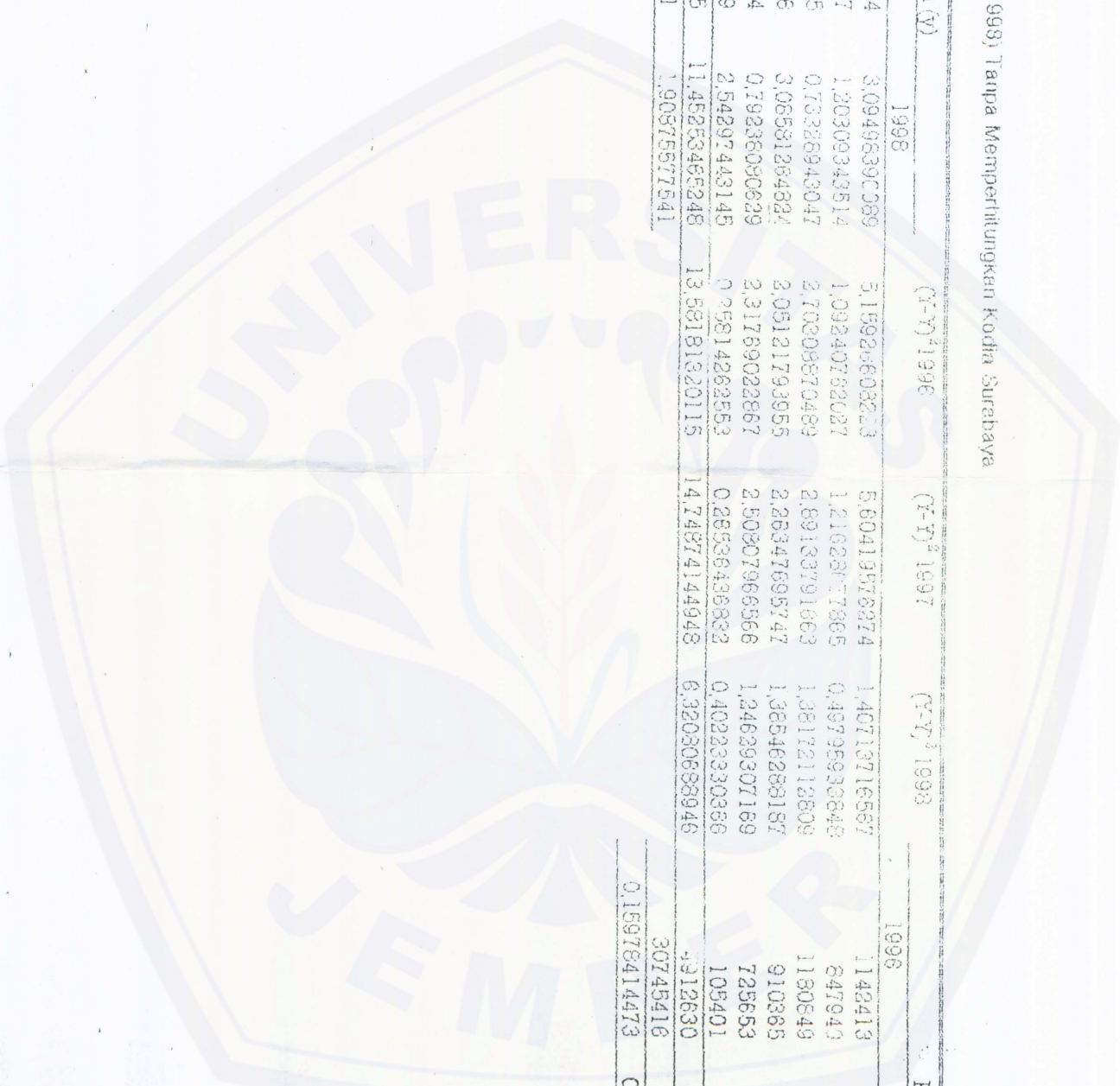
Sektor/Subsektor	1996	1997	1998
Pertanian	92219.17	40063.37	33598.70
Tanaman Bahan Makanan	3822.90	3178.24	2904.53
Tanaman Perkebunan	-	-	-
Peternakan	65795.86	13965.66	6771.33
Kehutanan	-	-	-
pPribanan	23100.42	22919.48	23922.84
Pertambangan dan penggalian	2596.91	1945.78	1029.11
Pertambangan Migas	-	-	-
Pertambangan Non -migas	-	-	-
Penggalian	2596.91	1945.78	1029.11
Industri Pengolahan	5077423.07	5585679.34	4165763.30
Makanan, Minuman dan Tembakau	2360624.06	2605386.79	1819908.24
Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	80480.43	84835.01	64865.72
Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	174046.72	180035.72	125643.43
Kertas dan Barang cetakan	125355.26	135149.47	93550.90
Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	138162.95	158535.96	80975.30
Semen dan Barang Balian bukan Logam	624870.94	665007.06	427033.67
Logam dasar Besi dan baja	733656.61	796795.33	670136.97
Alat Angkutan mesin dan Peralatannya	630858.60	730937.20	677089.63
Barang lainnya	209397.45	228926.80	200959.48
Listrik, gas dan Air Bersih	395673.91	405606.10	436194.92
Listrik	268655.09	259499.12	294299.58
Gas Kota	60946.72	75530.40	68758.57
Air Bersih	66072.10	70576.58	73136.77
Konstruksi	1554827.43	1617220.46	1101182.08
perdagangan, Hotel dan Restoran	3603485.89	3906351.26	3196676.89
Perdagangan	1653867.29	1743579.97	1407148.20
Hotel	352032.77	358322.39	352087.25
Restoran	1597585.82	1804448.90	1437441.45
Pengangkutan dan Komunikasi	1404369.89	1427049.09	1417096.49
Angkutan	1251718.81	1217346.83	1203254.34
Angkutan Rel	22753.42	23733.44	30529.23
Angkutan Jalan Raya	615715.16	579005.20	525975.03
Angkutan Laut	102524.88	114319.21	124583.06
Angkutan Penyeberangan	11648.81	11881.85	11600.81
Angkutan Udara	-	-	-
Jasa Penunjang Angkutan	499616.54	518407.12	510466.20
Komunikasi	152651.54	179702.26	213842.15
Fos dan Telekomunikasi	138058.44	160020.09	185983.63
Jasa Penunjang Komunikasi	14592.65	19682.17	27858.52
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1385540.04	1426255.44	1035403.97
Bank	880333.92	892614025	560748.07
Lembaga Keuangan Bukan Bank	87056.85	100752.85	70434.14
Jasa Penunjang Keuangan	13010.10	13469.76	8521.89
Sewa Bangunan	82299.57	86430.56	84667.31
Jasa Perusahaan	322839.60	332988.03	312062.56
Jasa-jasa	930636.27	963085.06	836236.21
Pemerintahan Umum	323257.04	327177.94	321697.33
Swasta	607379.23	635907.12	514538.80
Jasa Sosial Kemasyarakatan	81349.14	91033.54	75427.10
Jasa Hiburan dan Kebudayaan	21018.24	23770.38	19191.43
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	505011.85	521083.19	419920.36
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>14446766.59</b>	<b>15373261.39</b>	<b>12224211.67</b>
<i>PDRB Jawa Timur</i>	<i>61752469.04</i>	<i>64853575.88</i>	<i>54336273.28</i>

Indeks Williamson SWP I (1996 - 1998) Tanpa Memperhitungkan Kodra Surabaya

	Pendapatan Perkapita (Y)			Penduduk (D)				
	1996	1997	1998	1996	1997	1998		
17204931796	4.892777436034	3.094968390389	3.15926603223	5.60413576274	1.40713716567	1142413	1164646	1441
40368247406	1.42260267197	1.20309343514	1.092440762207	1.21623077865	0.49796938848	847940	859290	851
30496826306	0.82506313706	0.73328643047	2.70308870489	2.89183791863	1.38172112809	1180649	1185437	1192
38127289604	4.02994220866	3.08581264824	2.05121793955	2.26347695747	1.36546288187	910385	919515	944
92666931715	0.94176481274	0.79236090629	2.31769022267	2.50907966566	1.24629307189	725653	732123	785
95714291136	3.04059188769	2.54297443145	0.25814262553	0.28536436832	0.40223320386	105401	106135	105
69439317955	15.15373957845	11.45253465248	13.58181320115	14.74874144948	6.32030683946	312630	4967146	5321
44906652993	2.52545659841	1.90875577541				30745416	30934038	31741
						0.15976414473	0.18057216266	0.16771651

Digital Repository Universitas

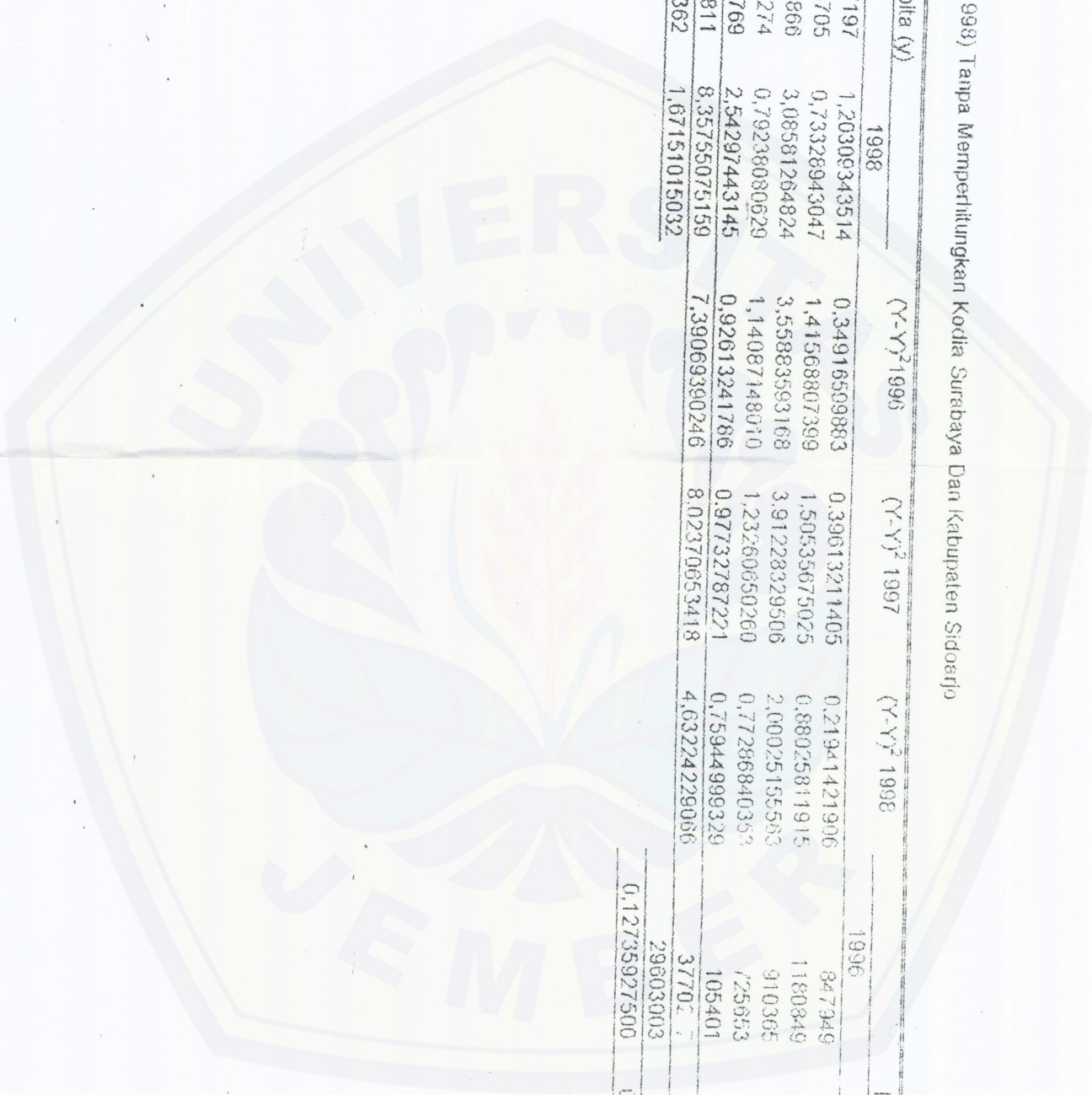
60151940741  
60935029529  
63941601936



Indeks Williamson SWP I (1996 - 1998) Tanpa Mempertimbangkan Kodra Surabaya Dan Kabupaten Sidoarjo

	Pendapatan Perkapita (Y)			(Y-Y) <sup>2</sup> 1996	(Y-Y) <sup>2</sup> 1997	(Y-Y) <sup>2</sup> 1998	Penduduk (t)		
	1996	1997	1998				1996	1997	1998
1,403,882,474,06	1,422,602,671,97	1,203,093,435,14	0,34916559883	0,39613211405	0,21941421906	847,949	859,290	1,996	
0,804,358,263,08	0,825,063,137,05	0,733,289,430,47	1,41568867399	1,50535675025	0,88025811915	118,0849	113,6437	1,996	
3,881,272,896,04	4,029,942,208,66	3,085,812,648,24	3,55883593168	3,91228329506	2,00025155563	910,365	919,515	1,996	
0,926,069,317,15	0,941,764,812,74	0,792,380,805,29	1,14087148010	1,23260650260	0,77286840353	725,673	732,127	1,996	
2,957,142,911,36	3,040,591,887,69	2,542,297,443,45	0,92613241786	0,977322787221	0,75944999329	105,401	106,135	1,996	
9,973,392,586,169	10,259,964,718,11	8,357,550,751,59	7,39069390246	8,02370653418	4,63224229066	377,027	380,2500	1,996	
1,994,785,172,34	2,051,992,943,62	1,671,510,150,32				296,03003	297,69392	1,996	
						0,12735927500	0,12773186634	0,12815	

0,48650438522  
 0,4933598795  
 0,46095019680





	Pendapatan Perkapita (Y) (dalam juta rupiah)			Penduduk (I)				
	1996	1997	1998	1996	1997	1998		
4.72049731786	4.89277486034	3.09498390089	3.03105948170	1.17869179296	0.69885791441	1112413	1164646	14
1.40389247406	1.42260267197	1.20309343514	2.48249069382	2.84692587640	1.11495277996	847949	859290	8
0.80455826308	0.82906313705	0.73328943047	4.72852150172	5.22041666250	2.322781312449	1180849	1185437	11
3.88122289604	4.02994220866	3.08581264824	0.81324008289	0.84650296504	0.68360810967	910365	919515	9
0.92666931715	0.94176481274	0.79238080629	4.21400972017	4.70075057148	2.15099145245	725653	732123	7
2.95714291136	3.04059186769	2.54297443145	0.00049870639	0.00480170880	0.08063768405	105401	106135	1
6.16192934588	6.61646417925	4.36051210517	10.12801791367	12.29608876619	4.41632505343	234720	2323486	28
0.85632252543	21.76920375770	15.81304675765	25.39783410043	29.09417834336	11.47318611847	7257150	7290632	81
2.97947464649	3.10988625110	2.25900667966				33089936	33257524	345
						0.21931592736	0.21921752203	0.235248

0.79212502364  
0.812062306613  
0.72723634697



Lampiran : 11 Tingkat Pertumbuhan konorst satuan Wilayah Pembangunan I Selama Kurun waktu 1996 - 1998 Berdasarkan PDRB Menurut kabupaten Dan Kotanadia Di SWP I  
 Atas Dasar Harga Konsten 1993 (urtaan Rupiah)

$$\text{Tahun 1996 : G} = \frac{26497945.92 - 24237229.19}{24237229.19} = 0.093274553 / 9.327455374\%$$

$$\text{Tahun 1997 : G} = \frac{27989894.40 - 26497945.92}{26497945.92} = 0.056304306 / 5.630430693\%$$

$$\text{Tahun 1998 : G} = \frac{2239636.67 - 27989894.40}{27989894.40} = 0.199831255 / -19.9831255\%$$